



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SEMESTER II TAHUN 2024



INFINITY
BPPP BANYUWANGI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KP
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP)
BANYUWANGI
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Udayana ini dapat diselesaikan dengan baik.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dalam upaya mewujudkan sebagai unit pelayanan teknis yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap terhadap BPPP Banyuwangi.

Kami berharap laporan Monev ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di BPPP Banyuwangi.

Banyuwangi, 30 Desember 2024

PPID BPPP Banyuwangi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. METODOLOGI	4
BAB III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	5
BAB IV. PENUTUP	14

BAB I PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendasari hak setiap warga negara untuk mengakses informasi yang relevan dengan kepentingan publik. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan demokrasi dalam pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memberikan akses yang mudah dan adil kepada masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi faktor kunci yang penting untuk mencapai tujuan badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good government). Dengan memastikan ketersediaan data dan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak tanpa hambatan birokrasi yang kompleks, dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki sistem dan mengawasi tata kelola badan publik. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya yang terjangkau, dan dalam cara yang sederhana. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi sangat penting dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi untuk mencapai good governance, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudahan akses informasi bagi masyarakat dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 yang mengatur standar pelayanan informasi publik.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi terkait dengan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan layanan lainnya yang diselenggarakan dapat diakses oleh masyarakat secara transparan. Hal ini memungkinkan masyarakat, terutama nelayan dan pihak-pihak terkait, untuk memperoleh informasi yang relevan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan, pengambilan keputusan yang berbasis bukti, dan partisipasi yang lebih baik dalam kegiatan yang dilakukan oleh BPPP Banyuwangi.

Dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dan mematuhi KIP, BPPP Banyuwangi harus memiliki kebijakan dan regulasi yang memastikan akses terbuka terhadap informasi-informasi yang relevan. Hal ini mencakup memiliki mekanisme permohonan informasi yang mudah diakses, prosedur yang jelas untuk memproses permohonan tersebut, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang diminta dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, KIP di BPPP Banyuwangi memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan akuntabilitas, dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan sektor perikanan di wilayah tersebut.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi bertekad mewujudkan menjadi badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good government) serta terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi Nomor : KEP.91/BPPP.BYW/TU.140/I/2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik. Untuk menunjang kinerja dari

Tim PPID juga telah dibuatkan direktori/fitur khusus PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi pada laman/website yang memuat berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Melalui fitur dimaksud, masyarakat/stake holder juga dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi.

Dalam rangka pertanggung jawaban kinerja keterbukaan informasi publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dimaksud sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi.

BAB II METODOLOGI

2.1. Waktu

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik di BPPP Banyuwangi Semester 2 dilaksanakan mulai dari bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2024.

2.2. Tempat

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) BPPP Banyuwangi dilaksanakan di Ruang PPID Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPPP Banyuwangi, Jl. Raya Situbondo KM.17 Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

2.3. Pengumpulan Data

Monev terhadap PPID dilakukan terhadap beberapa indikator yakni pengembangan website, pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik.

BAB III HASIL PELAKSANAAN MONEV

3.1. Monev Internal

Berdasarkan Monev Internal yang dilakukan terhadap indikator pengembangan website diperoleh bahwa PPID BPPP Banyuwangi telah memiliki direktori khusus yang terhubung dengan website yang mengumumkan informasi publik terkait BPPP Banyuwangi dan dapat menerima permohonan informasi publik online.

Untuk indikator pengumuman informasi publik, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 21/PPID-KKP/VIII/2023, tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun, maka daftar informasi yang di buka ke publik meliputi :

1. Struktur Organisasi
2. Profil BPPP Banyuwangi
3. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
4. Pelayanan Publik
5. Realisasi Anggaran
6. Rencana Strategis
7. Rencana Kerja
8. Rencana Aksi
9. Indikator Kinerja
10. Perjanjian Kinerja
11. Laporan Kinerja
12. Laporan Tahunan
13. Laporan Keterbukaan Informasi Publik

14. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
15. Daftar Pengaduan Layanan
16. Agenda Kegiatan Pelatihan
17. Daftar Sarana dan Prasarana
18. Daftar Workshop BPPP Banyuwangi
19. Informasi SDM Pelatih dan Tenaga Kepelatihan
20. Informasi SDM Penyuluh dan Tenaga Kepenyuluhan
21. Daftar Asesor Kompetensi
22. Informasi Diklat Kepelautan
23. Daftar Skema LSP 1
24. Daftar Kerjasama
25. Video Publikasi Pelatihan Online
26. Standar Pelayanan Publik
27. SOP BPPP Banyuwangi

Sedangkan Daftar Informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 1/PPID-KKP/III/2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen Pihak Ke III)
 - Data Perusahaan;
 - Rencana Anggaran Biaya;
 - Jenis Spesifikasi Pekerjaan
2. Rincian Harga Sendiri (HPS) barang dan jasa.

3. Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.
4. Data identitas pelapor kejadian tidak baik.
5. Hasil rapat Baperjakat.
6. Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat.
7. Hasil Assesment.
8. Data Usulan Pemindehan dan Pengangkatan PNS (Mutasi).
9. Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai.
10. Arsip Kepegawaian.
11. Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited).
12. Data pegawai yang masih dalam pengadilan^[1] sebagai saksi atau tersangka.
13. Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai.
14. Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan tertentu.
15. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan.
16. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit.
17. Data hasil inovasi yang sedang dalam proses pengusulan paten.
18. Data Pribadi Purnawidya Pelatihan.
19. Data Pribadi Pelaku Usaha dan atau Pelaku Utama yang disuluh.
20. Surat-surat/Dokumen yang bersifat Rahasia, Sangat Rahasia dan Konfidensial.
21. Daftar user dan Password Server/Aplikasi/Pengkat TIK.

Sementara untuk indikator penyediaan informasi publik, diperoleh bahwa informasi yang dimaksud dalam Penetapan DIP, setelah dievaluasi telah disajikan dan dapat diakses publik melalui

laman PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi yaitu <https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-banyuwangi/layanan-informasi/daftar-informasi-publik/>



Gambar 1. Struktur Kelembagaan PPID Pelaksana BPPP Banyuwangi

Untuk indikator pelayanan informasi publik, sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Nomor KEP.91/BPPP.BYW/TU.140/I/2024 Tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, PPID BPPP Banyuwangi terbagi menjadi 4 (empat) bidang yaitu (1) Bidang Pelayanan Informasi dan Pelayanan Informasi Mobile; (2) Bidang Pengelolaan Informasi; (3) Bidang Penyelesaian Sengketa; dan (4) Bidang Teknologi Informasi. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan informasi publik di BPPP Banyuwangi, setelah dilakukan monev internal terhadap empat bidang tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

No.	Bidang	Uraian Tugas	Hasil Monitoring dan Evaluasi
1.	<p>Bidang Pelayanan Informasi dan Pelayan Informasi Mobile</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan informasi publik 2. Menyiapkan bahan dan konsep pelayanan informasi publik 3. Mencatat data dan informasi publik yang diterima 4. Memberikan masukan terhadap pelayanan informasi publik kepada pimpinan 5. Melakukan Survey Pelayanan Informasi Publik 6. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik. 	<p>Dari hasil monev untuk Bidang Pelayanan Informasi disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melakukan pelayanan informasi publik, Bidang pelayanan Informasi BPPP Banyuwangi telah menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari website resmi PPID Balai yaitu https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-banyuwangi/. Selain melalui website tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Unit Pelayanan Informasi Publik di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. 2. Dari hasil monev, pada tahun 2023 Semester 2, PPID BPPP Banyuwangi tidak ada menerima permohonan keberatan atau sengketa informasi publik, sehingga seluruh permohonan informasi yang diajukan dapat diselesaikan oleh PPID. 3. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima pada tahun 2024 Semester 2 secara online sebanyak 2 permohonan dan secara langsung belum ada permohonan. 4. Berdasarkan data tersebut, sarana sebagai media untuk mengajukan permohonan informasi publik ke BPPP Banyuwangi tahun ini melalui pengisian form permohonan informasi secara langsung maupun online sudah diakses oleh masyarakat.
2.	<p>Bidang Pengelolan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja 2. Menginventarisasi, mengklasifikasikan informasi publik dan dokumentasi 3. Menata, menyimpan, mendokumentasikan data dan informasi publik secara tertib dan teratur 4. Menyiapkan dokumen/arsip yang aman, dan mudah dicari dalam pemberian informasi publik. 	<p>Dari hasil monev disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pengelolaan telah menyediakan informasi publik sesuai dengan daftar informasi publik, dan mempercepat pemberian data/informasi kepada stakeholder yang dilakukan oleh Bidang Pelayanan Informasi.</p>

	<p>Bidang Penyelesaian Sengketa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pertimbangan hukum kepada Pelaksana PPID (Tim Pelayanan Informasi) atas keberatan yang disampaikan pemohon dan /atau pengguna informasi. 3. Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada Tim Penanganan Sengketa Publik dalam rangka penyelesaian sengketa informasi. 4. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila terjadinya sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun adjudikasi nonlitigasi. 5. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi. 	<p>Dari hasil monev disimpulkan bahwa selama Semester 2 Tahun 2024 walaupun terdapat permohonan pelayanan public akan tetapi Bidang Penyelesaian Sengketa tidak menerima data/informasi terkait dengan pengajuan sengketa informasi publik di BPPP Banyuwangi.</p>
--	--	---	--

	<p>Bidang Teknologi dan Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sistem fasilitas layanan informasi publik. 2. Menerima permohonan informasi publik yang masuk melalui Laman/Mobile PPID. 3. Menyiapkan dan memutakhirkan teknologi sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik. 4. Menyediakan informasi melalui Laman PPID dan Mobile PPID dalam rangka pelayanan informasi publik. 	<p>Dari hasil monev terhadap Bidang Teknologi dan Informasi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Bidang Teknologi dan Informasi telah melakukan updated data/informasi pada laman PPID https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-banyuwangi/</p> <p>Bidang ini juga telah melakukan koordinasi dengan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dapat selalu terkoneksi dengan laman PPID KKP, dan diharapkan nantinya pemohon informasi dapat terhubung langsung melalui satu laman dalam melakukan permohonan informasi publik.</p>
--	--	---	---

Detail Pengajuan Informasi 276/PPIDKKP-PIX/2024

PEMOHONAN

Jenis: Permohonan Informasi
Perkerjaan: Pelajar / Mahasiswa
Tujuan Pemintaan: Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Pusat)
Tujuan Penggunaan Informasi: Diteliti

IDENTITAS

Nama Lengkap: M Bahri Faton
Email: bahrifaton93@gmail.com
Alamat: DSAI SUMBER SEWAPOR
Perkerjaan: Pelajar / Mahasiswa

Kebutuhan Dokumen dan Informasi Anda
Surat izin Mangang

HISTORY

Tanggal	Status	Keterangan	Lampiran
12-11-2024 09:54:30	Pengajuan	Pengajuan Dibuat	-
16-11-2024 09:53:58	Kesalahan	Hai M. Bahri Faton, Untuk permohonan dokumen dan informasi berupa surat izin mangang dapat mengikuti mekanisme dan persyaratan yang ada terlampir. Kemudian untuk mengetahui kuota mangang saat ini di kami dapat langsung berkordinasi dengan Tim Pemangangan kami. Untuk kontak tim pemangangan kami dapat melalui DIC. Email: Selya Dwi Andari (081314448151). Terima kasih semoga informasi yang kami berikan dapat diterima dengan jelas. Salam hangat, Fitagus Layanan	Mekanisme_Pemohonan_Mangang

Detail Pengajuan Informasi 466/PPIDKKP-PIX/2024

PEMOHONAN

Jenis: Permohonan Akademik
Perkerjaan: Wirausaha / Petaku Usaha
Tujuan Pemintaan: Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Pusat)
Tujuan Penggunaan Informasi: Bisnis

IDENTITAS

Nama Lengkap: Jasep Santoso
Email: asepsantoso12@gmail.com
Alamat: RT 01 RW 14 DILSUN JENHARI DESA GENTENG KULON KECAMATAN GENTENG BANYUWANGI
Perkerjaan: Wirausaha / Petaku Usaha

Kebutuhan Dokumen dan Informasi Anda
Cara lengkap pembudidayaan udang vaname untuk usaha rumah. Jika bisa ada pelatihan atau konsultasi saya sangat berterima kasih.

HISTORY

Tanggal	Status	Keterangan	Lampiran
20-10-2024 08:14:27	Pengajuan	Pengajuan Dibuat	-
28-10-2024 04:01:52	Kesalahan	Hallo Bapak Asep Saifulloh, Kami informasikan untuk nota pembudidayaan udang vaname untuk usaha rumah dapat Bapak kunjungi link model model yang kami lampirkan. Untuk pelatihan beserta APDN saat ini beroperasi melalui program pelatihan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Pelatihan berbasis PNUB (Mandi/Embayar) dan pelatihan dapat langsung datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPPP Banyuwangi kami. Terima kasih atas permohonan informasi yang Bapak sampaikan. Pelagas PPID BPPP Banyuwangi	MODUL_MSJ_FIX

3.2. Monev External

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor : B.3984/SJ.5/HM.470/IX/2024 tanggal 17 September 2024 perihal permohonan pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, maka PPID Pelaksana BPPP Banyuwangi melakukan pengisian sesuai dengan Self Assessment Questionnaire (SAQ) sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Pengisian dilakukan dengan menyertakan link serta tangkapan layar terkait informasi public pada SAQ yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengisian tersebut PPID BPPP Banyuwangi mendapatkan nilai 98,6 dari 100 yang artinya masuk kedalam kategori Informatif. Walaupun demikian seluruh PPID Pelaksana Lingkup KKP dapat melakukan klarifikasi atas nilai yang diberikan sehingga dapat menambah nilai tersebut. Berikut nilai hasil pelaksanaan Monev KIP :

No	UPT	Nilai	Status Klarifikasi
1	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung	97,15	Sudah
2	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru	98,55	Sudah
3	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	86,9	Sudah
4	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRSDI) Jatiluhur	92,95	Sudah
5	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	98,6	Sudah
6	Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok	95,65	Sudah
7	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	96	Sudah
8	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP)	95,55	Sudah
9	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon	97	Sudah
10	Balai Riset Pemuliaan Ikan, Sukamandi	98,3	Sudah
11	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP)	80,3	Sudah
12	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	94,6	Sudah
13	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP)(Palembang)	84,5	Sudah
14	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros - belum lengkap	58,8	Sudah
15	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	98,55	Sudah
16	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	87,75	Sudah
17	Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) Ancol	81,15	Sudah
18	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur,Sukamandi	92,25	Sudah
19	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	92,65	Sudah
20	Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	59,95	Sudah
21	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	84,8	Sudah
22	Loka Riset SumberDaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus	73,25	Sudah
23	Loka Riset Perikanan Tuna,Benoa	82,15	Sudah
24	Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) Boalemo, Gorontalo	91,85	Sudah
25	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	52,25	Sudah
1	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP)	92,6	Belum
2	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	91,2	Belum
3	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	41,8	Belum
4	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	8,45	Belum
5	Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	95,3	Belum
6	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	89,15	Belum
7	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	71,35	Belum
8	Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	63,75	Belum
9	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladang	68,45	Belum
10	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	22,3	Belum
11	Loka Perencanaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi	80	Belum

3.3.Prestasi

PPID Pelaksana BPPP Banyuwangi pada Tahun 2024 meraih penghargaan Unit Kerja Berpredikat Informatif lingkup KKP dan Unit Kerja Terbaik Kualifikasi Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.



BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Monev yang dilakukan, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPP Banyuwangi telah berjalan dengan baik, namun juga perlu dilakukan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan layanan informasi kepada publik. Disamping pelaksanaan Monev ditingkat internal, juga telah dilakukan monev yang dilaksanakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). PPID BPPP Banyuwangi melaksanakan komitmen keterbukaan informasi publik pada Tahun 2024, dan setelah dilakukan evaluasi terhadap kuesioner SAQ KIP yang diisi BPPP Banyuwangi. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik BPPP Banyuwangi sebagai Unit Pelaksana Teknis Informatif ini didukung oleh komitmen Pimpinan Balai dan Tim PPID yang senantiasa melakukan pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di BPPP Banyuwangi.

Dengan hasil ini masih perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut oleh BPPP Banyuwangi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga dalam mempertahankan predikat sebagai Unit Pelaksana Teknis Informatif dalam memberikan layanan informasi dan menunjang Keterbukaan Informasi Publik di BPPP Banyuwangi.

DOKUMENTASI
KOMITMEN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK















Tuesday, 23 April 2024 at 08.35
-8.071596,+114.421003
Jalan Raya Situbondo No. 17
Banyuwangi
East Java 68453



Tuesday, 23 April 2024 at 08.34
-8.071934,+114.421334
Jalan Raya Situbondo No. 17
Banyuwangi
East Java 68453





PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK





**Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Banyuwangi**
sebagai
Unit Kerja Terbaik Kualifikasi Informatif
dalam Keterbukaan Informasi Publik

2





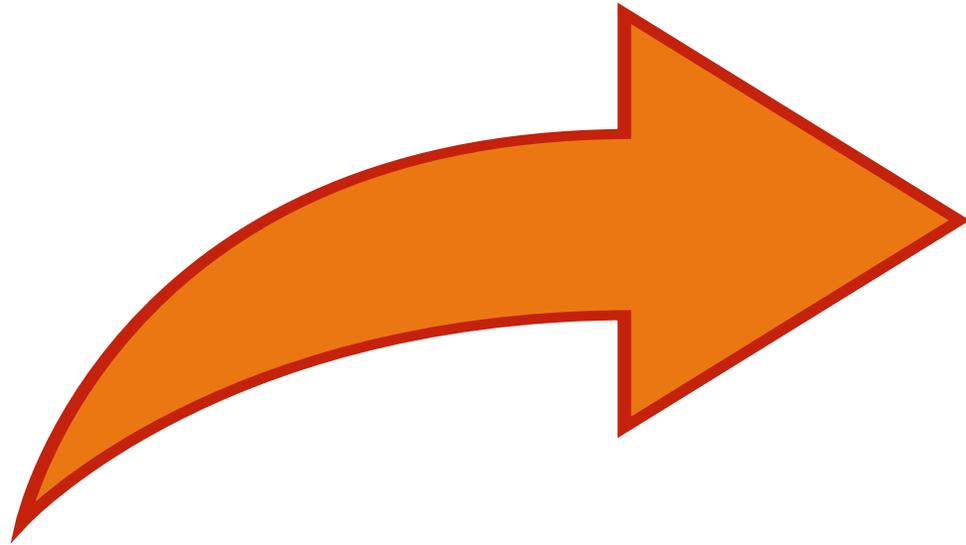
HASIL PENILAIAN PPID BPPSDM 2024

Jakarta, 5 Desember 2024

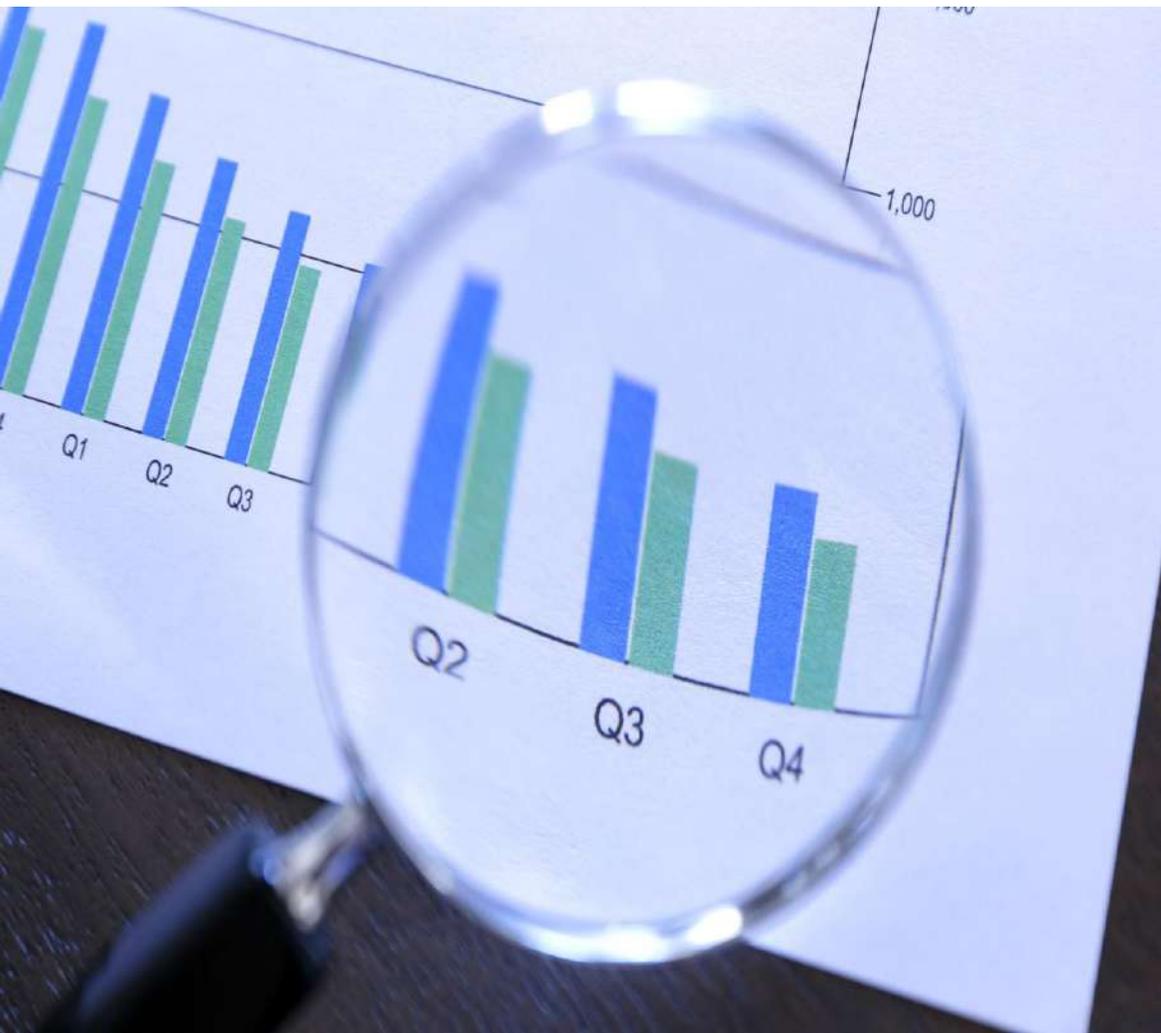


- Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, Tim Penilai KKP bersama Tim monev BPPSDM telah melaksanakan evaluasi tahap I dari 3 tahapan monev yaitu verifikasi dokumen SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) PPID UPT
- Unit Pelayanan Teknis BPPSDM sebanyak 37 di seluruh Indonesia
 - Pusat Pelatihan KP: 6 UPT,
 - Pusat Pendidikan KP: 16 UPT, dan
 - Pusat Penyuluhan KP: 15 UPT

HASIL PEROLEHAN SEMENTARA



HASIL EVALUASI SAQ KIP KKP



- **Informatif : 19 UPT**
- **Menuju Informatif : 9 UPT**
- **Cukup Informatif : 4 UPT**
- **Kurang Informatif : 4 UPT**
- **Tidak Informatif : 2 UPT**

UPT LINGKUP PUSAT PELATIHAN KP

ESELON I	PPID PELAKSANA UNIT KERJA ESELON I	NILAI VERIFIKASI	NILAI VERIFIKASI (BOBOT 80%)	STATUS
BPPSDMKP	PPID Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Sukamandi	92,25	73,80	Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	92,65	74,12	Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	86,9	69,52	Menuju Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	98,6	78,88	Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung	97,15	77,72	Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon	97	77,60	Informatif

UPT LINGKUP PUSAT PENYULUHAN

ESELON I	PPID PELAKSANA UNIT KERJA ESELON I	NILAI VERIFIKASI	NILAI VERIFIKASI (BOBOT 80%)	STATUS
BPPSDMKP	PPID Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP)	92,6	74,08	Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP)	80,3	64,24	Menuju Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP)	95,55	76,44	Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPP) Maros	58,8	47,04	Kurang Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRBPATPP) Sempur, Bogor	100	80,00	Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP)(Palembang)	84,5	67,60	Menuju Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) Ancol	81,15	64,92	Menuju Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRSDI) Jatiluhur	92,95	74,36	Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan, Sukamandi	98,3	78,64	Informatif
BPPSDMKP	PPID Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok	95,65	76,52	Informatif
BPPSDMKP	PPID Loka Riset SumberDaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus	73,25	58,60	Cukup Informatif
BPPSDMKP	PPID Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi	80	64,00	Menuju Informatif
BPPSDMKP	PPID Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) Boalemo, Gorontalo	91,85	73,48	Informatif
BPPSDMKP	PPID Loka Riset Perikanan Tuna, Benoa	82,15	65,72	Menuju Informatif
BPPSDMKP	PPID Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	87,75	70,20	Menuju Informatif

UPT LINGKUP PUSAT PENDIDIKAN

NO.	ESELON I	PPID PELAKSANA UNIT KERJA ESELON I	NILAI VERIFIKASI	NILAI VERIFIKASI (BOBOT 80%)	STATUS
	BPPSDMKP	PPID Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	94,6	75,68	Informatif
	BPPSDMKP	PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	52,25	41,80	Kurang Informatif
	BPPSDMKP	PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	91,2	72,96	Informatif
	BPPSDMKP	PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	41,8	33,44	Kurang Informatif
	BPPSDMKP	PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	9,45	7,56	Tidak Informatif
	BPPSDMKP	PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	95,3	76,24	Informatif
	BPPSDMKP	PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	89,15	71,32	Menuju Informatif
	BPPSDMKP	PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	59,95	47,96	Kurang Informatif
	BPPSDMKP	PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	71,35	57,08	Cukup Informatif
	BPPSDMKP	PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	84,8	67,84	Menuju Informatif
	BPPSDMKP	PPID Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	63,75	51,00	Cukup Informatif
	BPPSDMKP	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong	68,45	54,76	Cukup Informatif
	BPPSDMKP	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	22,3	17,84	Tidak Informatif
	BPPSDMKP	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	96	76,80	Informatif
	BPPSDMKP	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	98,55	78,84	Informatif
	BPPSDMKP	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru	98,55	78,84	Informatif



● **SEMANGAT**

**UNTUK MERAIH PREDIKAT
PPID INFORMATIF**